

Implementation of Waste Management Policy Based on the Regional Regulations of Sidoarjo District Number 6 Year 2012 in Boro Village of Tanggulangin

[Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin]

Devi Fitria Permata Sari¹⁾, Lailul Mursyidah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to know and understand how to implement the Waste Management Policy Based on the Regional Regulations of Sidoarjo District Number 6 Year 2012 in Boro Village of Tanggulangin. The research method used in this study is a qualitative descriptive research approach using primary and secondary data in the form of sentences obtained through interviews, observations, documentation, and online from websites and journals. The results of this research show that the implementation of the waste management policy based on the Sidoarjo District Regulations Number 6 Year 2012 in the village of Boro district of Tanggulangin there are 4 (four) indicators namely: on the first indicator, that is, the communication carried out by the village government through socialization involving the equipment of the village, the garbage carriers and the community. The third indicator is that the attitude of the policymakers is in line with the rules and well and the officers perform their duties according to their respective duties, but the lack of understanding from the public related to the issue of garbage. The fourth indicator, that the bureaucratic structure has not been able to work to the maximum because there is no clear SOP, then the waste management is carried out by way of garbage taken from the citizens' houses then the trash officers carry out the clearance according to the types, after the clearing of the garbage carrier officers directly bring the waste to the TPA for further waste processing in TPA so that the final processing can be done.*

Keywords – Implementation, Management, Waste

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa kalimat-kalimat tertulis yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan didapatkan secara online dari website dan juga jurnal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin terdapat 4 (empat) indikator yaitu : pada indikator pertama, yaitu Komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui sosialisasi yang melibatkan perangkat Desa, petugas pengangkut sampah dan masyarakat. indikator kedua, yaitu Sumberdaya yang dimiliki dalam Implementasi Pengelolaan Sampah di Desa Boro masih kurang optimal, mulai dari anggaran yang masih kurang, terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk pengangkutan sampah dan fasilitas yang kurang memadai. Indikator ketiga, yaitu Sikap para pegawai pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan aturan dan sudah baik dan para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing, namun kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan persoalan sampah. Indikator keempat, yaitu Struktur Birokrasi belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum ada SOP yang jelas, maka pengelolaan sampah dilakukan dengan cara sampah diambil dari rumah warga kemudian para petugas sampah melakukan pemilahan sesuai dengan jenis-jenisnya, setelah melakukan pemilahan petugas pengangkut sampah langsung membawa sampahnya ke TPA untuk pengolahan sampah lebih lanjut di TPA agar dapat dilakukan pemrosesan akhir.*

Kata Kunci - Implementasi, Pengelolaan, Sampah

I. PENDAHULUAN

Sampah adalah barang atau produk yang sudah tidak terpakai dan sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagai hasil kegiatan manusia dan alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari kegiatan rumah tangga,

pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya [1]. Masalah sampah selalu menjadi topik pembicaraan dan perdebatan di manapun, hampir diseluruh negara yang ada didunia memiliki permasalahan lingkungan yaitu permasalahan yang berhubungan dengan sampah termasuk di negara Indonesia. Masalah lingkungan masih menjadi permasalahan pokok di Indonesia [2]. Permasalahan sampah masih menjadi sorotan dan hampir semua kota di Indonesia menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Khususnya di daerah perkotaan, dapat dikatakan bahwa mengelola sampah di perkotaan sangat sulit dan memiliki banyak tantangan dalam pengelolaannya, belum lagi di perkotaan banyak sekali terdapat pabrik dan perusahaan besar yang menghasilkan sampah jauh lebih banyak.

Secara keseluruhan, sampah disebut juga dengan limbah. Sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni limbah organik dan limbah anorganik. Sampah organik merupakan jenis limbah yang bisa mengalami proses pelapukan, seperti sisa-sisa makanan, sementara limbah anorganik adalah jenis limbah yang tidak mengalami dekomposisi, seperti plastik. Limbah organik yang berasal dari aktivitas rumah tangga sering kali dihasilkan dalam jumlah besar dan seringkali hanya dibakar, yang pada akhirnya menyebabkan polusi lingkungan sekitar [3].

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah [4]. Menurut Kuncoro Sejati (2009 : 24), pengelolaan sampah merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah mulai dari ditimbulkannya sampah hingga pembuangan akhir [5]. Sampah harus dikelola dengan sebaik mungkin, jika sampah tidak dibuang dan dikelola dengan baik maka akan berdampak pada pencemaran terhadap lingkungan manusia. Dampaknya akan menimbulkan masalah yaitu seperti, dapat merusak keestetikan dan kelestarian alam dan juga dapat mengganggu kenyamanan akibat sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau dan tidak enak dipandang mata. Selain itu fakta bahwa sampah yang terdiri dari berbagai bahan organik dan anorganik, apabila telah terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar dan menumpuk akan menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam binatang seperti lalat, tikus, kecoa, kucing, dan sebagainya yang dapat menjadi sarang penyakit.

Permasalahan sampah merupakan kepentingan publik yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah serta masyarakat untuk menanganinya [6]. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengambil tanggung jawab terhadap persoalan sampah di sekitar rumah, seperti pembuangan sampah secara sembarangan yang bisa mengakibatkan banjir. Tingkat pengetahuan teknologi pengelolaan sampah yang rendah dari Sumber Daya Manusia juga menjadi penyebab meningkatnya masalah sampah. [7]. Pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah perlunya untuk selalu diperhatikan agar lingkungan sekitar tetap bersih dari limbah/sampah. Pemerintah telah berupaya melalui program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, yang berhasil terwujud dengan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai pengelompokan sampah. Namun, karena kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang, masalah sampah sering diabaikan, masyarakat masih menyepelekan masalah sampah, terbukti dengan banyaknya orang yang masih membuang sampah sembarangan. Dampaknya, lingkungan menjadi tercemar [8].

Kebijakan pemerintah dalam pengolahan sampah harus memiliki landasan yang kuat agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Kebijakan yang dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang bernilai harga jual kemudian memanfaatkan sampah menjadi pupuk dan lain sebagainya. Pembuangan sampah yang masih memiliki nilai energi dikurangi secara signifikan sehingga pencemaran lingkungan dapat dicegah [5]. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, menguraikan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mengubah pandangan sampah menjadi sumber daya [9].

Di Pasal 10 dijelaskan dalam ayat (1) bahwa pelaksanaan pengangkutan sampah, seperti yang diuraikan dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara berikut: Pertama, sampah rumah tangga menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh kelurahan, RT, atau RW. Kedua, sampah dari TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ketiga, sampah dari berbagai kawasan seperti permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah hingga ke TPS atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. Keempat, sampah dari fasilitas umum, sosial, dan lainnya, baik dari sumber sampah atau TPS, hingga ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ayat (2) memastikan bahwa pelaksanaan pengangkutan sampah ini tetap memisahkan jenis sampah sesuai dengan kategorinya. Ayat (3) menekankan bahwa alat pengangkutan sampah harus memenuhi standar keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. Selanjutnya, di Pasal 18 dalam ayat (1), lembaga pengelola sampah yang ada di tingkat rukun tetangga (RT) di desa/kelurahan memiliki tanggung jawab berikut: Pertama, memfasilitasi pemberian tempat sampah di setiap rumah tangga dan menyediakan alat angkut untuk memindahkan sampah dari rumah tangga ke TPS. Kedua, memastikan pemilahan sampah dilakukan dengan baik di setiap rumah tangga. Ayat (2) menjelaskan bahwa lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) di desa/kelurahan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RT. Mereka

juga dapat mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada kepala desa/lurah. Ayat (3) menyatakan bahwa lembaga pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RW dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah dari tingkat RT hingga RW [9].

Namun berdasarkan observasi di lapangan terkait dengan Implementasi Pengelolaan Sampah di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu yang pertama, belum tersedianya tempat sampah di masing-masing rumah. yang kedua, belum adanya pemilahan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya, sampah di Desa Boro hanya di angkut kemudian di buang ke TPA Jabon. Ketiga, belum adanya koordinasi dari tingkat rukun warga (RW) terkait dengan pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga. Dan yang keempat, belum adanya pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga, karena belum tersedianya TPS di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan rekapitulasi Data Sampah di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Sampah Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah Timbulan Sampah Harian	Timbulan Sampah Tahunan
1	Tahun 2019	1.223,93 ton	446.733,65 ton
2	Tahun 2020	1.086,24 ton	396.476,90 ton
3	Tahun 2021	1.114,65 ton	406.6847,51 ton

Sumber : Diolah dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

Pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa volume timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019,2020, dan tahun 2021. Terlihat data tahunan tahun 2019 berjumlah 446.733,65 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang berjumlah 396.476,90 ton kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 sampah yang dihasilkan mencapai 406.6847,51 ton. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, angka timbulan sampah menurun hingga 12% di tahun 2020. Timbulan sampah kembali meningkat namun hanya 3% di tahun 2021 namun tidak sebanyak tahun 2019.

Di Desa Boro, setiap tahun jumlah penduduknya selalu bertambah, di tahun 2022 jumlah penduduk Desa Boro mengalami kenaikan 4% dari tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya penduduk di Desa Boro maka sampah yang dihasilkan setiap harinya akan terus bertambah dan mengakibatkan beberapa permasalahan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas di setiap daerah maka akan semakin meningkat juga jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya [10].

Pada tabel di bawah ini menunjukkan rekapitulasi data timbulan sampah di Desa Boro tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.
Data Sampah Desa Boro Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Timbulan Sampah Harian	Jumlah Timbulan Sampah Per Bulan
1	Agustus	927,9 kg	27,837 ton
2	September	1.005 kg	30,140 ton
3	Oktober	1.050 kg	31,485 ton
4	November	1.017 kg	30,527 ton
5	Desember	1.082 kg	32,467 ton

Sumber : Diolah dari Petugas Pengangkut Sampah, 2023

Tabel 3.
Data Sampah Desa Boro Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Timbulan Sampah Harian	Jumlah Timbulan Sampah Per Bulan
1	Januari	1.056 kg	31,674 ton
2	Februari	1.013 kg	30,384 ton
3	Maret	948,8 kg	28,464 ton
4	April	978,8 kg	29,363 ton
5	Mei	1.004 kg	30,135 ton
6	Juni	1.016 kg	30,489 ton
7	Juli	1.046 kg	31,382 ton

Sumber : Diolah dari Petugas Pengangkut Sampah, 2023

Dari tabel 2 dan 3 diatas menunjukkan bahwa timbulan sampah di Desa Boro setiap harinya bertambah maka setiap bulannya sampah juga semakin banyak jumlahnya. Semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah akan berdampak pada lingkungan sekitar, akan terjadi pencemaran pada lingkungan terutama di kota-kota besar yang memiliki banyak kawasan industri. Berdasarkan informasi yang ada, hanya sekitar 25% dari total jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Desa Boro yang berhasil diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara, sekitar 75% masih belum mendapat penanganan yang seharusnya dan memiliki potensi untuk menyebabkan pencemaran. Diperlukan upaya serius untuk menangani masalah produksi sampah yang cukup besar ini. Faktanya, sampah adalah salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang pada akhirnya bisa menyebabkan degradasi lingkungan, pencemaran, serta menghadirkan risiko kesehatan bagi masyarakat [11].

Gambar 1.

Timbulan sampah warga yang menumpuk di area sungai



Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Berdasarkan Gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa permasalahan sampah rumah tangga di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin harus di perhatikan, berdasarkan observasi dilapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin diantaranya yaitu, yang pertama, Desa Boro belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengakibatkan para warga membuang sampah di kawasan parit dan sungai. Yang kedua, belum adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam membuang sampah sembarangan dan masih belum adanya Peraturan Desa tentang penanganan sampah sehingga menyebabkan masih banyaknya penduduk yang membuang sampah sembarangan. Di kawasan sungai Desa Boro banyak sekali penumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat, dengan adanya penumpukan sampah di kawasan sungai dapat mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan merusak keestetikan lingkungan alam sekitar, selain itu pada saat hujan sampah-sampah tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat. Yang Ketiga, Pemerintah Desa hanya menyediakan tempat yang kurang memadai untuk pembuangan sampah dan menghimbau masyarakat agar tidak membuang di sekitar sungai. Namun para warga masih tetap membuang sampahnya di sungai dan membakar di sekitar rumah yang juga dapat mengganggu masyarakat lain.

Penulis juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Sahupala pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)”. Hasil dari penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah yang telah dilaksanakan dengan baik di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengawasi dan membimbing petugas lapangan serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah. Namun, di Kota Tasikmalaya, pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan maksimal, karena Pemerintah belum sepenuhnya memberikan dorongan kepada warga dalam pengelolaan sampah, akibat terbatasnya anggaran dari APBD, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah [12].

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Probosari, Ida. Pada tahun 2020 dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”. Penelitian ini mengkaji peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan bank sampah menjadi sebagai sarana pengelolaan sampah rumah tangga. Lebih berfokus pada peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa masyarakat berpartisipasi dalam proses musyawarah keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam program penanganan sampah rumah tangga dengan melalui program Bank Sampah Resik Becik yang ada di Kelurahan Krobokan Kota Semarang [13].

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh M. Farhan Surya Novaldi, Ayuning Budiati, dan Arenawati pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang”. Hasil penelitian yang di dapat dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Margagiri sudah berusaha mengatasi masalah sampah dengan cara sampah diangkut oleh petugas dari rumah warga kemudian diolah di TPS dan sebagian di buang di TPS Cilowong. Namun pada saat membuat keputusan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal [14].

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Barry Sir Ch Dalinda, Marlien T. Lopian, dan Ismail Sumampow pada tahun 2022, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan sampah, termasuk Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat setempat, telah berjalan dengan efisien. Namun, dalam hal Sumber Daya, terutama yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Wanea, masih belum memadai secara keseluruhan. Selain itu, dalam hal Disposisi, kinerja pegawai sudah cukup baik, meskipun terkadang kemajuan dalam penyelesaian tugas pegawai terkendala oleh keterbatasan fasilitas. [15].

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti melihat kondisi tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya di Desa Boro belum dilaksanakan dengan baik, dengan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, maka masyarakat akan terus mencemari lingkungan dengan sampah sehingga semakin lama akan muncul timbulan sampah. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. karena dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan masalah-masalah tersebut sesuai dengan indikator-indikator tahapan implementasi kebijakan menurut Edwards III. ditentukan oleh banyak faktor. Goerge C Edwards III (1980) dalam (Subarsono, 2005) menyatakan penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. terdapat empat indikator yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik, yaitu : 1) Aspek Komunikasi, untuk mengamati tingkat pemahaman dan kesadaran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. 2) Aspek Sumber Daya, agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal, para pelaksana harus didukung oleh sumber daya yang memadai. 3) Aspek Disposisi atau Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan, berhubungan dengan respons dan perilaku para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. 4) Struktur Birokrasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di wilayah pemerintahan setempat, dan hal ini berpengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk menyelidiki Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah di Desa Boro. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan dari objek yang diteliti [17]. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Adapun 3 informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala Desa, Petugas Pengangkut Sampah, dan Masyarakat. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik menurut teori Edward III. Teknik penganalisisan data dalam penelitian menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman melalui : 1) Pengumpulan Data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan mengenai fenomena dan fakta dilapangan. 2) Reduksi Data, yaitu proses memilih, merangkum, pemfokusan data yang akan memberikan gambaran untuk mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 3) Penyajian Data, mengumpulkan informasi yang terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Awalnya, data kualitatif disajikan dalam bentuk naratif teks, tetapi seiring berjalannya waktu, metode penyajian data kualitatif semakin berkembang dan kini mencakup penggunaan grafik, diagram, dan matriks. 4) Penarikan Kesimpulan, melibatkan proses menyusun data sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan [18].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam suatu proses kebijakan. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar dapat mengetahui dampak dan tujuan yang diinginkan (winarno:2016) [19]. Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang di mana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas dan tindakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut. Salah satu contoh implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah pengelolaan sampah, di mana pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat untuk mengurus sampah yang dihasilkan, dengan tujuan memelihara kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan bersih. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Boro. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori Goerge C Edwards III (1980), menyatakan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu dipengaruhi oleh 4 indikator antara lain yaitu :

Komunikasi

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan bisa dipengaruhi oleh aspek komunikasi. Keberhasilan implementasi dianggap efektif ketika para pembuat kebijakan memahami langkah-langkah yang diperlukan. Komunikasi terjadi melalui keputusan yang dibuat dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang disampaikan secara akurat kepada pelaku. Komunikasi bertujuan untuk mencapai konsistensi di antara pelaksana kebijakan yang akan diimplementasikan dalam masyarakat [20]. Edward III mengemukakan bahwa untuk mengukur keberhasilan komunikasi, ada tiga indikator yang dapat digunakan, yaitu Transmisi (pemindahan informasi), Kejelasan (kemudahan dipahami), dan Konsistensi (kesesuaian antara komunikasi dan tindakan yang diambil).

Apabila penyaluran komunikasi dilakukan dengan baik maka implementasi juga dapat berjalan baik. Di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi miskomunikasi yang dikarenakan komunikasi yang disampaikan sudah melalui beberapa tingkatan birokrasi [20]. Selain itu, proses komunikasi yang berbeda dapat timbul dari berbagai sumber informasi yang beragam. Untuk memastikan efektivitasnya implementasi, penting bagi para pelaksana keputusan untuk memahami apakah mereka mampu menjalankannya.. Komunikasi yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Meskipun dalam beberapa situasi, ketidakpastian dalam pesan kebijakan tidak selalu menghambat pelaksanaannya, namun kejelasan tetap diperlukan oleh para pelaksana kebijakan agar tujuan yang diinginkan sejalan dengan isi kebijakan. Dalam komunikasi perintah, konsistensi sangat penting agar dapat dijalankan dengan baik [21]. Jika instruksi-instruksi yang diberikan sering berubah, para pelaksana kebijakan dapat merasa bingung dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Boro, Pemerintah Desa Boro melakukan komunikasi melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan komunikasi antara Perangkat Desa Boro dan Petugas Pengangkut Sampah serta masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Desa Boro mengenai kegiatan sosialisasi, sebagai berikut :

“Untuk kegiatan pengangkutan sampah kita sudah melakukan sosialisai kepada RT/RW bahwa di Desa Boro akan melakukan kegiatan pengangkutan sampah agar para masyarakat di desa Boro tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah sembarangan di halaman rumah” (Wawancara tanggal 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa melaksanakan komunikasi dengan cara melakukan sosialisasi. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat berjalan efektif apabila tujuan kebijakan dapat dipahami oleh tiap-tiap individu yang bertanggungjawab dalam suatu kebijakan. Tujuan dari komunikasi yang baik dan jelas adalah agar dapat memberikan pemahaman informasi yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga informasi lebih jelas dan lengkap.

Gambar 2.
Sosialisasi Pengelolaan dan Penanganan Sampah



Sumber : Diolah dari Perintah Desa Boro, 2023

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa perangkat Desa Boro telah melakukan sosialisasi yang melibatkan antara Kepala Desa beserta perangkat Desa lainnya, petugas pengangkut sampah dan juga perwakilan dari RT/RW masing-masing. Sosialisasi untuk memberitahukan kepada warga terkait dengan kegiatan pengangkutan sampah dan menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Pernyataan dari Kepala Desa Boro yang menyatakan sudah melakukan sosialisasi diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pegawai Pengangkut Sampah, menyatakan pernyataan sebagai berikut :

“Pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sekitar sungai, pemerintah desa melakukan himbauan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada RT/RW masing-masing agar disampaikan kepada masyarakat, tetapi sosialisasinya tidak dilaksanakan secara rutin” (Wawancara tanggal 20 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa beserta jajarannya melalui sosialisasi telah berjalan dengan lancar. Akan tetapi, para pelaksana kebijakan dalam melakukan sosialisasi masih kurang maksimal karena tidak konsisten dalam pelaksanaannya, sebab sosialisasi terkait pengelolaan sampah dilaksanakan hanya satu kali dalam pertemuan awal dan tidak dilaksanakan secara rutin. Selain itu, yang mengikuti sosialisasi hanya sebagian warga saja, yang dapat menimbulkan miskomunikasi dari setiap masyarakat akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan pengelolaan sampah di Desa Boro. Dan sebagian yang tahu ada yang setuju dan ada yang kurang setuju dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan cara pengangkutan sampah karena adanya penarikan iuran sebagian warga tidak mau jika harus membayar.

Data lapangan menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Sahupala (2020) yang menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah dapat melaksanakan komunikasi melalui sosialisasi yang melibatkan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Dalam penelitiannya juga terdapat penyampaian komunikasi kepada masyarakat yang masih kurang, dan juga belum optimalnya sosialisasi yang diberikan karena sosialisasi tidak diadakan secara rutin. Selain itu, penelitian ini dianggap belum optimal karena sebagian masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan tentang pengelolaan sampah.

Sumber Daya

Goerge C Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Walaupun komunikasi dalam kebijakan telah dilakukan dengan efektif, jika sumber daya yang tersedia bagi pelaksana kebijakan terbatas, implementasinya tidak akan berjalan lancar. Selain itu, pihak yang merancang dan melaksanakan kebijakan harus menggunakan sumber daya dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam implementasi, sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas fisik. Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses Implementasi. Selain itu, sumber daya manusia juga perlu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dengan optimal. [22].

Dalam pelaksanaan kebijakan, diperlukan beberapa jenis sumber daya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas. Di antara ketiga sumber daya ini, sumber daya manusia menjadi yang paling krusial karena tanpa kehadiran manusia, sumber daya lainnya tidak dapat diakses. Namun, penting juga bahwa sumber daya manusia yang tersedia mencukupi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan.

Tabel 4.
Sumber Daya Manusia Implementasi Pengelolaan Sampah Di Desa Boro

No	Nama	Jabatan
1	Mochammad Shoicunnurudin	Kepala Desa
2	Arif Suprayogi	Sekretaris Desa
3	Andry August Furcon	Petugas Pengangkut Sampah
4	RT/RW	RT/RW

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Boro, 2023

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa dari segi sumber daya manusia masih kurang karena tenaga ahli dalam menangani sampah jumlah pegawainya hanya 1 orang saja saat ini untuk mengangkut sampah warga. Kurangnya sumber daya manusia atau tenaga ahli dalam pengelolaan sampah juga dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dapat berjalan efektif atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Pengangkut Sampah, menyatakan pernyataan sebagai berikut :
“Saya awalnya dulu bersama dengan rekan saya diberikan tugas untuk mengangkut sampah, yaitu terdiri dari 3 orang yang setiap hari bergantian mengambil sampah dari rumah warga, namun saat ini saya hanya sendiri yang mengambil sampah-sampah dari rumah warga” (Wawancara tanggal 20 Mei 2023)

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sumber daya dalam Implementasi pengelolaan sampah di Desa Boro sejauh ini belum optimal. Karena terbatasnya tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, awalnya petugas pengangkut sampah berjumlah 3 orang yang bergantian setiap harinya untuk mengambil sampah di setiap rumah di Desa Boro, namun saat ini yang mengambil sampah setiap harinya hanya 1 orang saja yang kurang lebih ada 300 rumah yang sampahnya harus diangkut. Sedangkan jumlah sampah yang harus di angkut setiap harinya dalam jumlah yang banyak maka tenaga ahli sangat kurang jika hanya sendirian.

Sarana dan prasarana juga merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan. Sarana merupakan peralatan yang bergerak dan bisa dipakai secara langsung seperti komputer, buku, pulpen, kipas angin dan lain-lain. Prasarana merupakan fasilitas umum sebagai penunjang dan tidak bisa dipindah-pindah misalnya kantor, gedung, kelas, ruangan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa di Desa Boro sumber daya masih belum memadai dan masih minimnya sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah kurang memadai bahkan tidak memiliki TPST. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan warga desa Boro yaitu Ibu Marlina, :

“Saya membuang sampah di sungai karena tidak ada tempat pembuangan sampah di Desa Boro jadi saya membuangnya di sungai kadang membakarnya di halaman rumah” (Wawancara tanggal 08 Juni 2023)

Pernyataan dari Ibu Marlina mengenai sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa Boro, hal tersebut dapat di diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Boro yaitu sebagai berikut :

“Iya, kami belum menyediakan TPST. Belum adanya TPST di Desa Boro karena kebutuhan dana untuk pembangunan TPST masih kurang” (Wawancara tanggal 15 Mei 2023)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari sarana dan prasarana terkait tempat pembuangan sampah belum memadai dan dinilai masih kurang. Akibatnya para warga membuang sampah di sungai dan membakarnya di halaman rumah. Implementasi kebijakan membutuhkan fasilitas atau sarana dan prasana yang memadai agar dapat mencapai tujuan suatu kebijakan. Sumber daya finansial dari pemerintah desa juga masih kurang karena terbatasnya anggaran dana untuk membangun TPST.

Kemudian dalam sumber daya juga berkaitan dengan dana/anggaran yang memiliki signifikansi yang setara dengan sumber daya manusia. Meskipun sumber daya manusia yang berkualitas telah ada, ketidakterersediaan dana melalui anggaran dapat menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut [22].

Tabel 5.
Sumber Daya Anggaran Untuk Pengelolaan Sampah Di Desa Boro

Per Bulan	Per Tahun
Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Boro, 2023

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa pendapatan upah petugas pengangkut sampah per bulan yaitu mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.250.000 dalam kurun waktu satu tahun maka jumlah upah petugas pengangkut sampah Rp. 27.000.000 . Kegiatan pengangkutan sampah ini baru berjalan sekitar 1 tahun maka upah dari petugas pengangkut sampah masih belum memiliki perubahan setiap tahunnya.

Gambar 3.

Pengangkutan sampah oleh petugas sampah



Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Dari gambar 3 menunjukkan bahwa Sumber daya fasilitas masih kurang memadai karena hanya ada 1 motor sampah 3 roda untuk mengangkut sampah sedangkan sampah dari rumah warga jika dihitung setiap harinya mencapai 1 ton sehingga jika sampah tidak mencukupi untuk di bawa ke motor maka petugas sampah harus bekerja dua kali untuk mengambil sampah dari rumah warga yang lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Desa Boro masih belum optimal. Disebabkan karena keberadaan keterbatasan sumber daya yang tersedia. mulai dari jumlah Pegawai Pengangkut Sampah yang terbatas, anggaran dana yang juga masih kurang, dan fasilitas yang kurang memadai.

Data dilapangan menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Barry Sir Ch Dalinda, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa aspek Sumber Daya yang dimiliki masih belum memenuhi kebutuhan sepenuhnya. Tidak hanya kekurangan jumlah pegawai, tetapi juga Kendala dalam pengelolaan sampah terjadi karena fasilitas yang terbatas, yang sebagian besar disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Disposisi

Menurut Goerge C Edwards III (1980), Disposisi adalah sikap atau kemauan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Selain memahami langkah-langkah yang perlu diambil pelaksana kebijakan diharapkan memiliki sikap dan keterampilan yang sesuai. Ini penting agar pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan tanpa adanya prasangka atau bias yang tidak diinginkan. Dalam variabel disposisi ini terdapat tiga indikator yang penting untuk dicermati yaitu : Efek disposisi, timbulnya hambatan di dalam implementasi disebabkan oleh para personil yang tidak melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pejabat tinggi. Oleh sebab itu, Personil yang dipilih dan diangkat perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama untuk memajukan kepentingan masyarakat. Pengaturan birokrasi, hal tersebut berkaitan dengan penunjukan yang diikuti dengan pengangkatan staf yang memiliki kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi yang sesuai. Insentif, adanya tambahan keuntungan maupun biaya tertentu bagi para pelaksana kebijakan Dengan maksud mendorong pelaksanaan yang optimal terhadap kebijakan yang telah diinstruksikan, insentif ini diberikan sebagai langkah untuk memenuhi kepentingan individu maupun kelompok atau organisasi [22].

Dukungan dari atasan memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dukungan ini tercermin dalam hal-hal seperti menetapkan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan dalam hal daerah, agama, suku, jenis kelamin, serta karakteristik demografis lainnya. Tambahan dari itu, alokasi dana yang memadai penting untuk memberikan insentif kepada para pelaksana program, mendorong mereka untuk memberikan dukungan penuh dalam menjalankan kebijakan atau program tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kepala Desa Boro, menyatakan sebagai berikut :

“warga Desa Boro ini kurang kesadarannya dengan sampah makanya warga membuang sampah di sungai gedang rowo, oleh karena itu kami telah meminta bantuan dari dinas pekerjaan umum agar sampah di sungai dapat di normalisasikan kembali, agar sungai Gedang Rowo Desa Boro kembali bersih dan tidak tercemari oleh sampah” (Wawancara tanggal 15 Mei 2023)

Pernyataan dari Kepala Desa Boro diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pegawai Pengangkut Sampah yaitu Bapak Aan, menyatakan pernyataan sebagai berikut :

“menurut saya warga Desa Boro ini kurang kesadarannya tentang bahayanya membuang sampah sembarangan, dan kurang paham jesin-jenis sampah jadinya warga Desa Boro tetap membuang dan membakar sampah-sampahnya sembarangan tanpa memikirkan dampak kedepannya yang akan terjadi” (Wawancara tanggal 20 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah baik dan Para pegawai menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan harapan. Mereka telah menunjukkan niat dan kesadaran dalam menjalankan tugas mereka serta memiliki komitmen terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Hanya saja dari masyarakat yang kurang kesadaran diri dan kurang pemahaman mengenai persoalan sampah dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk membayar iuran untuk sampah.

Gambar 4.
Pembersihan sampah yang berada di sungai



Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa dinas pekerjaan umum membantu pemerintah Desa Boro agar menormalisasikan sungai dengan membersihkan sungai, mengangkut sampah-sampah dari sungai agar sungai lebih bersih dan lingkungan menjadi sehat. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif adalah sikap implementor. Jika implementor melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik.

Data lapangan menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Barry Sir Ch Dalinda, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa sikap para karyawan sudah positif, karena mereka memiliki kesadaran terhadap tanggung jawabnya dan mengeksekusi tugas mereka sesuai prosedur yang ditentukan. Namun, terkadang mereka mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas akibat keterbatasan fasilitas dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah organisasi yang didesain secara logis untuk mengatur kerja individu-individu guna melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Menurut Goerge C Edwards III (1980), menyatakan bahwa ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak

efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus bisa mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi dengan baik [22].

Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama dari banyak individu dalam pelaksanaannya. Jika struktur birokrasi yang ada tidak mendukung, sumber daya akan kurang efektif dan kekurangan motivasi, yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mendukung kebijakan dengan mengkoordinasikan dengan baik. Ada dua indikator untuk menilai faktor struktur birokrasi atau organisasi. Pertama, Standar Prosedur Operasional (SOP) adalah pedoman rutin yang memungkinkan pelaksana menjalankan kegiatan sesuai standar minimal. Kedua, Fragmentasi Organisasi adalah penyebaran tanggung jawab program sesuai dengan bidang masing-masing. Implementasi efektif memerlukan fragmentasi organisasi yang baik untuk memastikan pelaksanaan dilakukan oleh organisasi yang kompeten [20].

Di Desa Boro belum memiliki Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Kepala Desa Boro, yang menyatakan :

“Belum ada peraturan desa dan belum ada Standar Operasional Prosedur terkait dengan pengelolaan sampah karena Desa Boro belum memiliki TPST, jadi kami menggunakan Peraturan Daerah untuk menangani sampah di Desa Boro. Nanti jika sudah dibangun TPST akan dibuatkan peraturan desa tentang pengelolaan sampah” (Wawancara tanggal 15 Mei 2023)

Kemudian Kepala Desa Boro mengatakan bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Ddesa Boro dengan kegiatan pengangkutan sampah, sebagai berikut :

“sampah di Desa Boro diangkut dari rumah-rumah setiap harinya, para petugas pengangkut sampah kemudian mengumpulkan sampah-sampahnya untuk diangkut ke TPA” (Wawancara tanggal 15 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pada pengolahan sampah belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum ada SOP yang jelas karena Desa Boro belum memiliki TPST. Maka pengelolaan sampah di Desa Boro dilakukan dengan cara pengangkutan sampah oleh petugas pengangkut sampah, setelah sampah diambil dari rumah warga kemudian para petugas sampah melakukan pemilahan sesuai dengan jenis-jenisnya, setelah melakukan pemilahan petugas pengangkut sampah langsung membawa sampahnya ke TPA untuk pengolahan sampah lebih lanjut di TPA agar dapat dilakukan pemrosesan akhir.

Data dilapangan menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Sahupala (2020) yang menunjukkan bahwa belum memiliki Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa yang secara spesifik mengatur proses pengelolaan sampah, sehingga mengimplementasikannya belum bisa berjalan secara maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Implementasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Hasil dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada usaha dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah, implementasinya masih belum berhasil secara keseluruhan. Masih terdapat banyak kegiatan pengelolaan sampah yang belum berjalan optimal.

Pertama pada aspek Komunikasi, komunikasi berjalan efektif apabila penyaluran komunikasi dilakukan dengan baik maka implementasi juga dapat berjalan baik. Tujuan dari komunikasi yang efektif agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami informasi yang disampaikan agar terjalin komunikasi yang baik dari semua pihak yang dilibatkan dalam suatu implementasi kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa Boro melalui sosialisasi telah berjalan dengan lancar. Namun sosialisasi tersebut masih kurang maksimal karena tidak konsisten dalam pelaksanaannya, sebab sosialisasi tidak dilaksanakan secara rutin.

Kedua pada aspek Sumber Daya, Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam implementasi pengelolaan sampah di Desa Boro, dilihat dari pegawai yang menangani sampah hanya memiliki 2 orang saja yang bergantian setiap harinya untuk mengambil sampah di setiap rumah dalam jumlah yang banyak. Sumber daya fasilitas pun masih kurang memadai karena hanya ada 1 motor sampah 3 roda untuk mengangkut sampah. Sumber daya finansial dari pemerintah desa juga masih kurang karena terbatasnya anggaran dana untuk membangun TPST.

Ketiga pada aspek Disposisi, Para pegawai telah menjalankan tugas mereka dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka menunjukkan tekad dan kesadaran dalam menjalankan tugas, serta mengemban tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Hanya saja dari masyarakat yang kurang kesadaran diri

dan kurang pemahaman mengenai persoalan sampah dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk membayar iuran untuk sampah.

Keempat pada aspek Struktur Birokrasi, Pengolahan sampah belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum ada SOP yang jelas karena Desa Boro belum memiliki TPST. Maka pengelolaan sampah di Desa Boro dilakukan dengan cara pengangkutan sampah oleh petugas pengangkut sampah, setelah itu membawa sampahnya ke TPA untuk pengolahan sampah lebih lanjut di TPA agar dapat dilakukan pemrosesan akhir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'Alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT. atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat tak terhingga, sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan tugas akhir berupa karya tulis ilmiah. Penelitian ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari beberapa pihak. Berkat Do'a dan dukungan juga dari berbagai pihak terutama Do'a Restu dari Orangtua yang sangat berpengaruh bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan staff Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Khususnya kepada dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

REFERENSI

- [1] S. Nurjanah and F. Siti, "PENERAPAN PERDA NO 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA," *Res. Lembaran Publ. Ilm.*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [2] B. D. Hastuti, F. Anwar, and T. Darmi, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN," *J. Ilmu Adm. dan Pemerintah. Indones.*, vol. 2, no. 2, 2021.
- [3] Joleha, E. Yenie, Bochari, I. Suprayogi, and Feranita, "Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Komposter Sebagai Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Kompos," *J. Community Engagem. Res. Sustain.*, vol. 2, no. 3, pp. 152–161, 2022.
- [4] U.-U. R. INDONESIA, *UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*, no. 1. 2008, pp. 1–37.
- [5] Hasaruddin, "IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TRANSLIK PASIR PANJANG," *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 2, no. 4, pp. 1023–1038, 2022.
- [6] S. Dzuliazahraa, E. M. Ramdanib, H. T. Gedeonac, and N. Nurliawatid, "Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung," 2022.
- [7] L. Primaturrisma and M. . Ir. Dr. Yeni Dhokhikah S.T., "GERILYA (GERAKAN INOVATIF PENGELOLAAN LIMBAH DAN PUSTAKA): PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI KEGIATAN VERMIKOMPOS DAN ECOBRICK GUNA MENUMBUHKAN PERAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EDUKASI DAN BIDANG LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS 2030," *J. Prot. J. Lingkung. BERKELANJUTAN J. Teor. dan Terap. Bid. Tek. Lingkung.*, pp. 30–38, 2020.
- [8] M. D. Marasabessy and I. Rumodar, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)," *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, pp. 16–24, 2022.
- [9] B. SIDOARJO and P. D. K. SIDOARJO, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN*, vol. 1965. 2012, pp. 1–28.
- [10] D. A. Kurniawan and A. Z. Santoso, "PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH SEPATAN KABUPATEN TANGERANG," vol. 1, no. 1, 2020.
- [11] A. F. Widiyanto, O. C. Pratiwi, and S. Yuniarno, "MODEL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANYUMAS," *Pros. Semin. Nas. dan Call Pap.*, no. November, pp. 488–499, 2017.
- [12] M. I. Sahupala, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)," *J. Ilm. Indones.*, vol. 5, no. 4, 2020.
- [13] I. Probosari, "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN KROBOKAN KOTA SEMARANG," 2020.

- [14] M. F. S. Novaldi, A. Budiati, and Arenawati, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang," *J. DESENTRALISASI DAN Kebijak. PUBLIK*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [15] B. S. C. Dalinda, M. T. Lopian, and I. Sumampow, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado," *J. Gov.*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [16] Y. P. Dalimunthe, "Jurnal Ilmiah Kesehatan Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III," *J. Ilm. Kesehat.*, vol. 1, no. 2, pp. 59–64, 2022.
- [17] I. M. Harjanti and P. Angraini, "Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) jatibarang, kota semarang," *J. Planol.*, vol. 17, no. 2, pp. 185–197, 2020.
- [18] S. Yunengsih and Syahrilfuddin, "THE ANALYSIS OF GIVING REWARDS BY THE TEACHER IN LEARNING MATHEMATICS GRADE 5 STUDENTS OF SD NEGERI 184 PEKANBARU," *J. PAJAR (Pendidik. dan Pengajaran)*, vol. 4, no. 4, pp. 715–723, 2020.
- [19] L. Rodhiyatussolichah, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo," pp. 1–9, 2023.
- [20] F. A. Zahro, "IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUTUH KECAMATAN MOJOSANGO KABUPATEN BOYOLALI," 2022.
- [21] S. D. Ambarwati and L. Mursyidah, "Policy Implementation of Exclusive Breastfeeding (ASI) Case Study in Bligo Village Candi District Sidoarjo Regency Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Studi Kasus Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," pp. 1–10, 2012.
- [22] M. S. Dr. Syahrudin, S.E., *Implementasi kebijakan publik*. 2018.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.